

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ALLAH.S.W.T atas segala rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dengan tersusunnya Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat didalam penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018, yang nantinya akan dijadikan bahan pendukung dalam pembuatan I Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Utara. Semoga Bermanfaat dan dapat memenuhi apa yang dibutuhkan.

Tanjung Selor, 29 Januari 2019
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara

Drs. HARTONO, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196105071985031014

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 Ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah Wajib Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah”,

Lebih lanjut dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, Pasal 1 ayat (8), disebutkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.

1. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana kerja tahunan ini, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 874);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
11. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018.
12. Instruksi Gubernur 188.54/1196/1/SETDA Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

2. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan wewenang untuk memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara.

B. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan koordinasi perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan.

C. Bidang Industri

Bidang Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan dan penyiapan kebijakan, pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah, industri kimia dan agro, industri logam mesin, elektronika, matematika, transportasi dan aneka (ILMETA), Mengkoordinasikan, kerjasama kemitraan bidang industri, memberikan masukan /saran dalam rangka penerbitan izin usaha industri skala investasi diatas 10 milyar, dan izin kawasan industri lintas kabupaten / kota.

D. Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi di bidang pembinaan pasar dan distribusi, melakukan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang jasa, perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan.

E. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, fasilitasi pembiayaan permodalan dan pengembangan produksi usaha dan pemasaran koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, menengah serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi dan UKM

BAB II
PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program dan Kegiatan

Kebijakan terjabar dalam program kerja prioritas yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara. Berikut Program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif dan lokasi untuk mencapai tujuan dan sasaran disperindagkop dan UKM tahun anggaran 2018.

Tabel Renja Tahun 2018

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	2018	
			target	Rp
9	10	11	13	14
3.07.3.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp 3.367.151.039
01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	50 Surat	Rp 11.601.039
01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Rp 101.000.000
01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	Rp 1.287.600.000
01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan / mesin yang dilakukan Perbaikan / Service	10 Unit	Rp 15.000.000

01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	Rp 165.941.406
01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Rp 74.000.000
01.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 Unit	Rp 75.000.000
01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tanggayang disediakan	100 Unit	Rp 22.435.492
01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	17 Eksemplar	Rp 15.000.000
01.17	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1030 Porsi	Rp 81.431.692
01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	110 Kali	Rp 524.741.410
01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan pengawasan di dalam daerah	120 Kali	Rp 253.400.000
	Perjalanan Dinas Luar Negeri	Jumlah Perjalanan Dinas luar negeri yang dilakukan	5 Kali	Rp 240.000.000
	Rapat Teknis Kegiatan Indagkop Se-Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Rapat Teknis dan Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sektor Perdagangan indagkop se - Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan	1 Kegiatan dan 1 Laporan	Rp 500.000.000
3.07.3.07.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp 540.000.000
02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan	30 Unit	Rp 50.000.000

02.11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	Jumlah rumah/gedung/gudang/ parkiran kantor dinas yang disewa	1 Unit	Rp 340.000.000
02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	16 Unit	Rp 150.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	-	-
3.07.3.07.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	79%	Rp 70.000.000
05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	20 Orang	Rp 70.000.000
3.07.3.07.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase industri kecil dan menengah yang sehat	25%	Rp 820.000.000
16.01	Pelatihan Peningkatan kemampuan Bagi Industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah IKM yang mampu mengembangkan usaha melalui pelatihan pengolahan komoditi unggulan daerah menjadi produk unggulan lokal	15 IKM	Rp 120.000.000
16.02	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Jumlah Perencanaan/ kajian pengolahan potensi unggulan didukung dengan pendampingan	-	-
16.06	Pembinaan dan pengembangan bagi pelaku Industri kecil dan menengah	jumlah IKM yang melakukan kemitraan dengan perusahaan	10 IKM	Rp 400.000.000

	Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri	Jumlah sarana penunjang dari klaster industri yang terbangun	1 Sarana	Rp 300.000.000
3.07.3.07.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase IKM yang menerapkan IPTEK	5%	Rp 428.400.000
17.01	Kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah Sosialisasi, Bimtek/Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknologi	2 Sosialisasi/ Bimtek/ Pelatihan	Rp 278.400.000
17.03	Kegiatan perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Jumlah Sosialisasi, Fasilitasi, Bimtek/Pelatihan dalam penerapan SNI pada bidang industri/IKM	1 Sosialisasi/ Bimtek/ Pelatihan	-
	Kegiatan Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Jumlah IKM yang mengikuti Bimtek/Pelatihan Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	25 IKM	Rp 150.000.000
	Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	Jumlah IKM yang mengikuti bimtek/pelatihan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	-	-
3.06.3.07.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Peredaran Barang/Jasa yang tidak memenuhi syarat ketentuan jual	43%	Rp 585.000.000

15.01	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	1 Raker	Rp 175.000.000
15.02	Penyelesaian Permasalahan-permasalahan konsumen	Jumlah fasilitasi penyelesaian masalah konsumen oleh BPSK	12 Bulan	Rp 180.000.000
15.03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah Pengawasan dan sosialisasi Peredaran barang dan jasa	5 Kegiatan	Rp 230.000.000
15.05	Pengembangan dan Pemanfaatan Sarana Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Jumlah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang dibangun		-
3.06.3.07.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Jenis Komoditi Ekspor	42%	Rp 1.100.000.000
17.01	Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Industri	Jumlah Kebijakan Sinkroniasi Pengembangan Industri yang di Koordinasikan	-	-

17.02	Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	Jumlah Sistem Informasi Peluang Pasar yang dikelola	1 Sistem	Rp 185.000.000
17.03	Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti Sosialisasi	-	-
17.08	Membangun jejaring dengan eksportir	Jumlah Asosiasi Eksportir Per-Komoditi	2 Asosiasi	Rp 75.000.000
17.09	Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait	Jumlah Koordinasi mengenai pengembangan ekspor	-	-
17.10	Pengembangan Kluster Produk Ekspor	Jumlah Produk Ekspor yang dikelompokkan dengan karakteristik tertentu	-	-
17.11	Peningkatan kapasitas lab pengujian mutu barang ekspor dan impor	Jumlah alat lab pengujian mutu barang ekspor dan impor	-	-
17.12	Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional	Jumlah Kegiatan Promosi yang dilakukan	4 Kegiatan	Rp 450.000.000
17.13	Peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan internasional*	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti Peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan internasional*	32 Orang	Rp 260.000.000
17.14	Pengelolaan Isu-isu Perdagangan Internasional	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Isu-isu Perdagangan Internasional	10 Koordinasi	Rp 130.000.000
3.06.3.07.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase usaha perdagangan dalam negeri yang dibina	5%	Rp 970.000.000

18.01	Penyempurnaan perangkat, peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	Jumlah Perangkat, peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional yang dibuat	-	-
18.03	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Sarana Perdagangan,	40 Pelaku Usaha	Rp 130.000.000
18.04	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Jumlah Kegiatan pendistribusian barang yang diawasi	3 Kegiatan	Rp 130.000.000
18.05	Pengembangan Pasar Lelang Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Pengelola Pasar Rakyat	50 Orang Peserta	Rp 100.000.000
18.06	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah sarana informasi Perdagangan yang terbangun	1 Sarana Informasi Perdagangan	Rp 60.000.000
18.07	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	50 Orang	Rp 150.000.000
18.08	Pembangunan Pasar Rakyat	Jumlah Pasar yang dibangun	1 Pasar	Rp 300.000.000
	Kegiatan Pasar Murah	Jumlah Kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan	8 Kali pasar murah	Rp 100.000.000
3.15.16	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil	Persentase pertumbuhan UKM baru	20%	Rp 2.750.000.000
16.03	memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	jumlah Usaha Kecil yang difasilitasi kemitraan usahanya	25 UKM	Rp 100.000.000

16.06	penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah Pelatihan kewirausahaan yang diikuti KUMKM	11 Kegiatan	Rp 2.420.000.000
16.07	pelatihan manajemen pengelola koperasi / KUD	jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen pengelola koperasi / KUD	-	-
16.08	sosialisasi HAKI kepada UMKM	jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi	-	-
	Sosialisasi Dukungan informasi penyesuaian permodalan	Jumlah Peserta Sosialisasi Dukungan informasi penyesuaian permodalan	-	-
	pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UKM dan Koperasi	jumlah koordinasi yang dilakukan	-	-
	Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	jumlah kegiatan promosi produk umkm yang dilakukan	1 Pameran dalam dan Luar Provinsi	Rp 230.000.000
3.15.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	67%	Rp 310.050.000
18.04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	jumlah kegiatan sosialisasi tentang prinsip-prinsip pemahaman berkoperasi kepada masyarakat	-	-
18.05	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yang dibina dan dilakukan pengawasan serta penghargaan	15 Koperasi	Rp 100.000.000
18.09	Monitorig, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring evaluasi	4 Laporan	Rp 210.050.000
				Rp 10.940.601.039

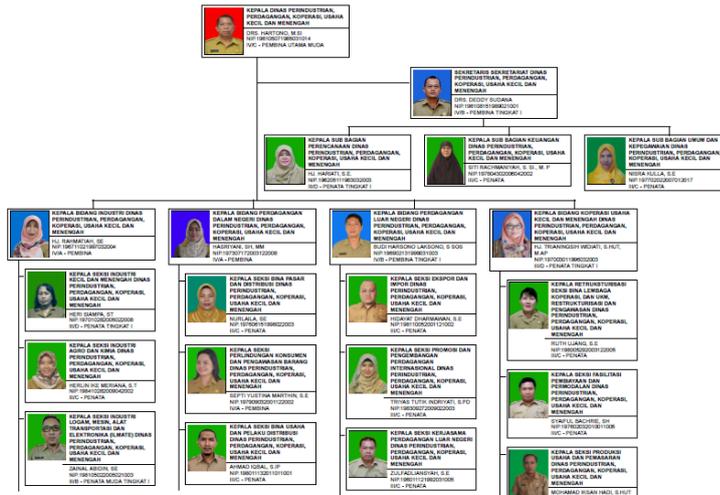
2. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan akhir Desember tahun 2015 memiliki jumlah pegawai Negeri Sipil Sebanyak 37 orang dan Pegawai Tidak Tetap Sebanyak 19 Orang berikut ini disajikan Jumlah pegawai Negeri dan Tenaga kontrak Dinas perindustrian, perdagangan koperasi dan UKM

Jumlah Pegawai Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Per Desember Tahun 2018

NO.	BAGIAN / BIDANG	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Sekretariat	9	10	19
2.	Bidang Industri	6	4	10
3.	Bidang Perdagangan dalam Negeri	6	8	14
4.	Bidang Perdagangan Luar Negeri	8	1	9
5.	Bidang Koperasi & UKM	5	3	8
J U M L A H		33	26	59

a. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara



Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara per Januari 2019

BAB III

a. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Tahun anggaran 2018 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Menerima Pagu anggaran sebesar Rp. 25.136.031.301,-, dan setelah dilakukan Perubahan Anggaran pada bulan Oktober 2018 Pagu anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menjadi 26.016.031.301,-

Belanja Langsung :

a. Sekretariat

Alokasi anggaran Rp. 4.958.510.462,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.170.996.317,- atau sebesar 84.12% dan sisa lebih pagu anggaran sebesar Rp 787.514.145,-

b. Perindustrian

Alokasi anggaran Rp. 2,999.566.840- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.939.225.928,- atau sebesar 97,99% dan sisa lebih pagu anggaran sebesar Rp. 60.340.912,-

c. Perdagangan Dalam Negeri

Alokasi anggaran Rp. 14.398.396.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.217.856.066,- Atau Sebesar 98.75% dan sisa lebih pagu anggaran sebesar Rp. 180.539.934,-

d. Perdagangan Luar Negeri

Alokasi anggaran Rp. 691.636.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 671.022.030 ,- atau sebesar 97.02 % dan sisa lebih pagu anggaran sebesar Rp. 20.613.970,-

e. Koperasi dan UKM

Alokasi anggaran Rp. 2.967.922.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2,726.662.042,- atau sebesar 91.87 % dan sisa lebih pagu anggaran sebesar Rp. 238. 456.707,-

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 terdapat beberapa permasalahan yang dimana permasalahan tersebut harus diupayakan untuk dipecahkan pada tahun selanjutnya

No	Sasaran Strategis	Hambatan	Upaya yang dilakukan ditahun berikutnya
1	2	3	4
2	Meningkatnya Daya Saing Industri	Masih terdapat IKM yang belum memenuhi standarisasi produk sehingga masih kalah bersaing dalam penjualannya	Akan dilakukan sosialisasi dan pelatihan tentang pengolahan produk menggunakan teknologi.
3	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Keterbatasan fasilitas penunjang perdagangan dalam negeri, Masih banyaknya pelaku usaha yang belum berorientasi ekspor dan masih banyak pelaku usaha yang belum sadar akan pentingnya melindungi hak – hak konsumen	Pada tahun berikutnya akan diupayakann melakukan penyediaan fasilitas perdagangan seperti pembangunan pasar, layanan informasi perdagangan online, kemudian Akan dilakukan Sosialisasi kepada pelaku eskpor dan melakukan promosi terhadap produk lokal ke pasar internasional serta melakukan pengawasan terhadap produk barang dan jasa yang beredar dan untuk melindungi hak-hak konsumen di Provinsi Kalimantan Utara.
4	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	Masih banyaknya pelaku ukm yang belum memahami mengenai manajemen keuangan sehingga mereka lebih rentan untuk mengalami kebangkrutan, dan dalam perkembangan koperasi di wilayah Kalimantan utara masih didapati koperasi yang tidak aktif maupun koperasi yang aktif namun tidak melaksanakan kewajibanya dalam mengelola koperasi seperti RAT.	Akan dilakukan dan diteruskan melakukan pendampingan melalui kegiatan pendampingan koperasi dan UKM yang bersumber dari dana DAK Kementerian Koperasi dan UMKM

BAB IV

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban sebuah OPD atas capaian kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) OPD ini nantinya akan menjadi bahan LPPD Provinsi dimana akan dievaluasi untuk melihat Sejauh mana capaian kinerja yang telah atau dapat dilaksanakan.

Dengan tersusunnya LPPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu memberikan informasi yang diperlukan sebagai bahan pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Utara.

Tanjung Selor, 29 Januari 2019

Kepala Dinas,

Drs. Hartono, M.Si
NIP. 19610507 198503 014

**REKAP DIREKTORI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN/KOTA SE-KALTARA
SEMESTER II TAHUN 2017**

No	Uraian	Unit Usaha	Tenaga Kerja (org)	Nilai Investasi (Rp. 000)	Kapasitas Produksi (unit/th)	Nilai Produksi (Rp. 000)	Nilai Bahan Baku Penolong (Rp. 000)
1	Kab. Bulungan	971	2.910	53.887.300	97.857.893	197.873.659	67.411.460
2	Kota Tarakan	530	2.276	41.049.265	19.866.917	91.313.742	11.141.660
3	Kab. Nunukan	545	1.751	12.340.750	7.726.880	7.522.457	5.174.576
4	Kab. Malinau	751	1.755	28.387.823	1.774.883	75.152.685	37.339.156
5	Kab. Tana Tidung	140	258	1.938.350	2.421.164	14.827.365	6.816.907
	Jumlah	2.937	8.950	137.603.488	129.647.737	386.689.908	127.883.758

Sumber : Database IKM 5 Kabupaten / Kota se Kalimantan Utara

Tanjung Selor, 23 Desember 2017

Kepala Disperindagkop dan UKM

Prov. Kalimantan Utara



Drs. HARTONO, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19610507 198503 1 014

**CAPAIAN PENDATAAN UMKM KABUPATEN/KOTA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2018**

No	Kabupaten/Kota	Mikro	Kecil	Menengah	Total
1	Kab. Bulungan	2997	431	52	3480
2	Kab. Tana Tidung	586	27	0	613
3	Kab. Malinau	381	556	207	1144
4	Kab. Nunukan	1781	556	198	2535
5	Kota Tarakan	3931	408	112	4451
Jumlah		9676	1978	569	12.223

Mengetahui,
Kepala Dinas



Drs. Hartono, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19610507 198503 1 014

2018

**DATA KOPERASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2018**

Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi			Total
	Aktif	Tidak Aktif	Diusulkan dibubarkan	
Bulungan	100	41	14	155
Malinau	83	32	18	133
Tana Tidung	20	8	14	42
Nunukan	292	51	19	362
Tarakan	57	9	11	77

Sumber : Data Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM masing-masing Kabupaten/Kota Periode Mei 2018

Mengetahui,
Kepala Dinas

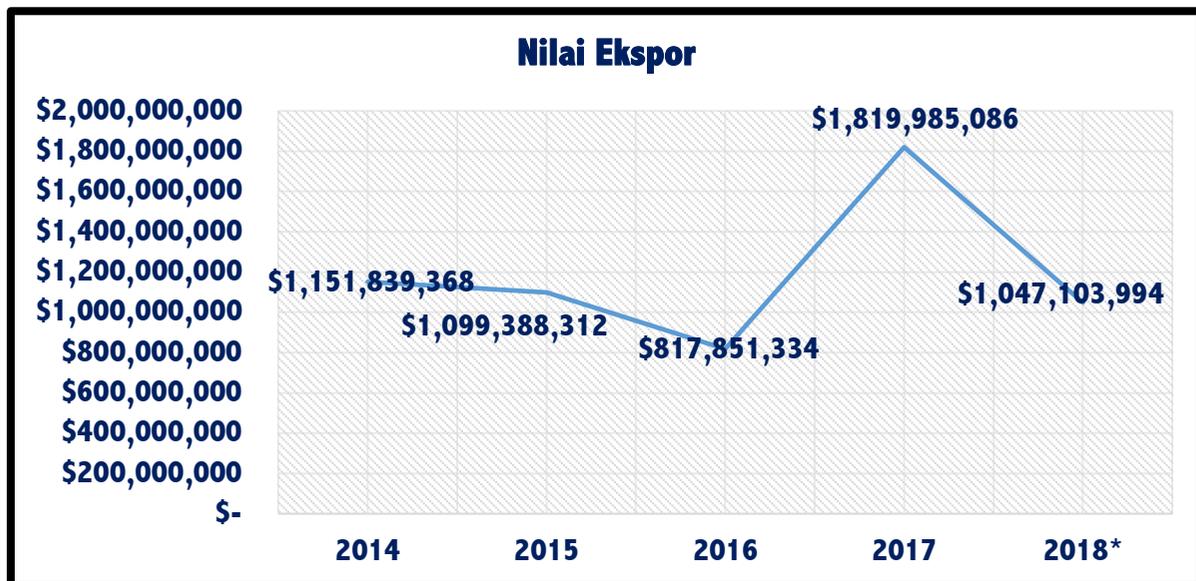

Drs. Hartono, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19610507 198503 1 014

DATA REALISASI EKSPOR DAN IMPOR TAHUN 2014 – 2018

1. Sumber Data sesuai dengan Laporan Perusahaan ke Dinas Perindagkop dan UKM - Realisasi Ekspor Kalimantan Utara

Tahun	Nilai Ekspor (\$)	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Ekspor
2014	\$ 1,115,839,368	-
2015	\$ 1,099,388,312	- 4.55%
2016	\$ 817,851,334	-25.61%
2017	\$ 1,819,985,086	122.53%
2018*	\$ 1,047,103,994	- 42.47%

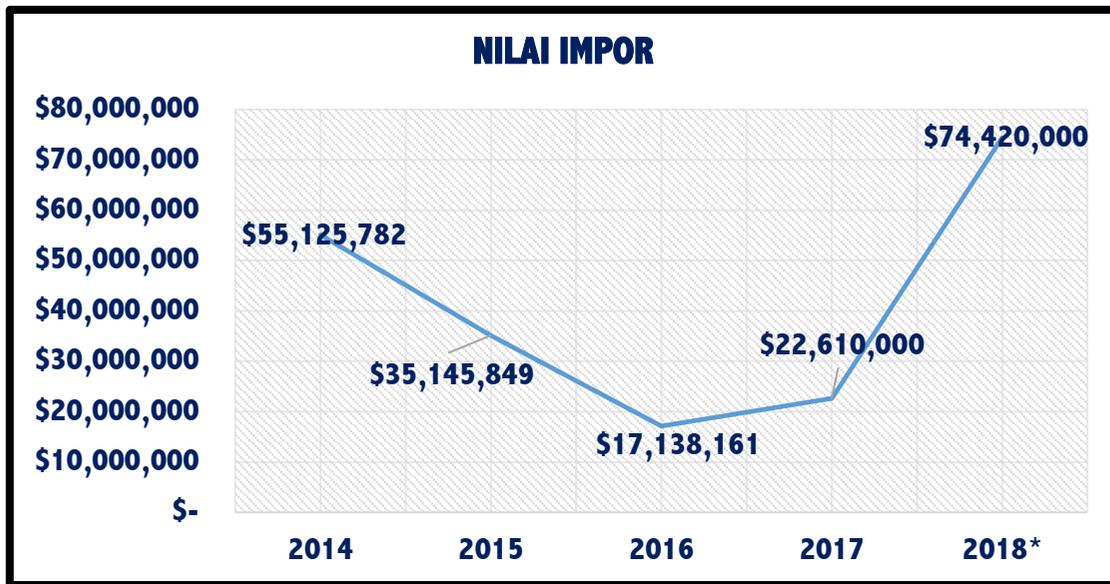
*Ket : *) Nilai Realisasi ekspor pada tahun 2018 merupakan nilai realisasi ekspor per November 2018*



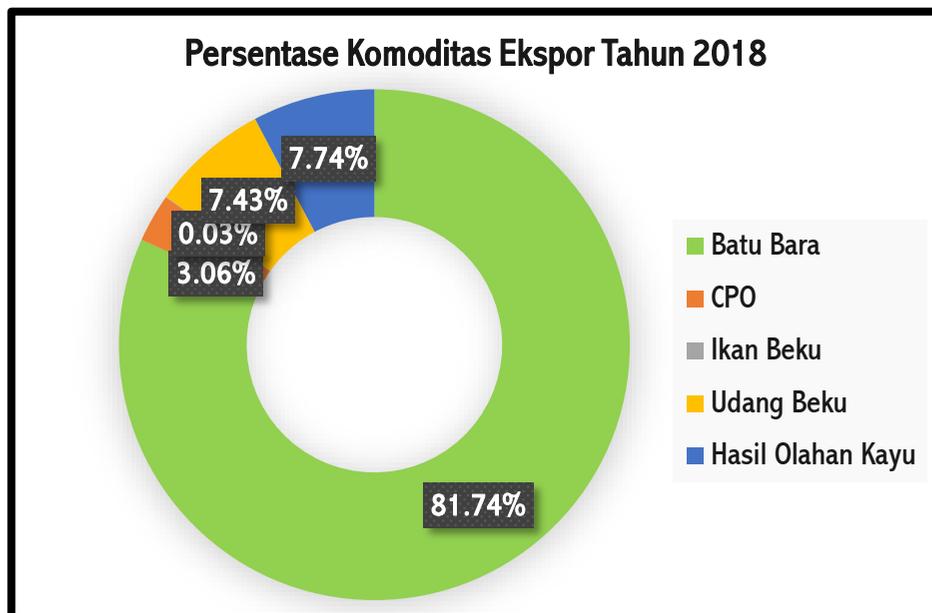
- Realisasi Impor Kalimantan Utara

Tahun	Nilai Impor (\$)	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Impor
2014	\$ 55,125,782	-
2015	\$ 35,145,849	-36.24%
2016	\$ 17,138,161	-51.24%
2017	\$ 22,610,000	31.93%
2018	\$ 74,420,000	229.15%

*Ket : *) *) Nilai Realisasi impor pada tahun 2018 merupakan nilai realisasi ekspor per November 2018*



2. Komoditas dan Negara Tujuan Ekspor / negara asal Impor
 - Komoditas Ekspor



Komoditas Utama Ekspor Kalimantan Utara pada tahun 2018 yaitu Batu Bara mencapai US\$ 855,910,757,46 atau 81.74% dari total ekspor Kaltara pada Tahun 2018. Komoditas lainnya yaitu CPO, Ikan Beku, Udang Beku dan Hasil Olahan Kayu yang memberikan total ekspor sebesar US\$ 191,193,236.31 atau 18.26%. Berikut ini data lengkapnya :

Komoditas	Realisasi Ekspor (\$)	Persentase
Batu Bara	855,910,757.4600	81.741%
CPO	32,075,211.9790	3.063%
Ikan Beku	339,043.2300	0.032%
Udang Beku	77,771,800.5490	7.427%
Hasil Olahan Kayu	81,007,180.5500	7.736%
Total	1,047,103,993.7680	100%

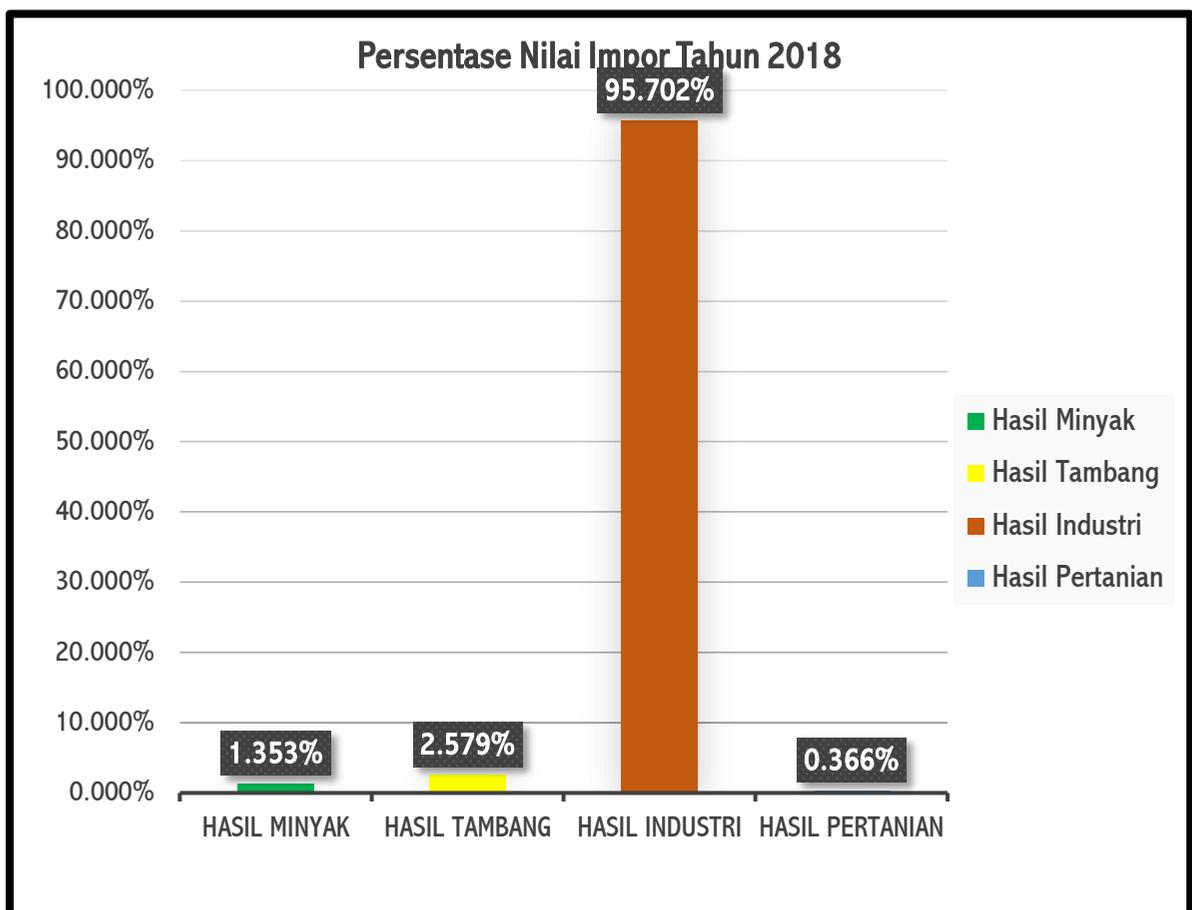
Ket : *) Nilai Realisasi ekspor pada tahun 2018 merupakan nilai realisasi ekspor per November 2018

- **Komoditas Impor**

Komoditas	Realisasi Impor	Persentase
Hasil Minyak	1,580,000	2.123%
Hasil Tambang	1,920,000	2.580%
Hasil Industri	70,630,000	94.907%
Hasil Pertanian	290,000	0.39%
Total	74,420,000	100%

*Ket : *) Nilai Realisasi Impor pada tahun 2018 merupakan nilai realisasi ekspor per November 2018*

Impor Provinsi Kalimantan Utara pada November 2018 mengalami kenaikan sebesar 304,64 persen dibanding Oktober 2018, yaitu dari US\$ 0,85 juta menjadi US\$ 3,42 juta. Nilai impor komoditi barang migas tercatat mencapai US\$ 0,63 juta, sedangkan untuk komoditi barang non migas tercatat mencapai US\$ 2,80 juta. Kenaikan nilai impor pada bulan November 2018 disebabkan oleh kenaikan nilai impor komoditi barang hasil minyak, sebesar 1.452,96 persen, yaitu dari US\$ 0,04 juta menjadi US\$ 0,63 juta di November 2018, serta komoditi hasil industri sebesar 351,31 persen, yaitu dari US\$ 0,60 juta menjadi US\$ 2,69 juta di November 2018. Secara kumulatif nilai impor Provinsi Kalimantan Utara periode Januari - November 2018 mencapai US\$ 74,42 juta.

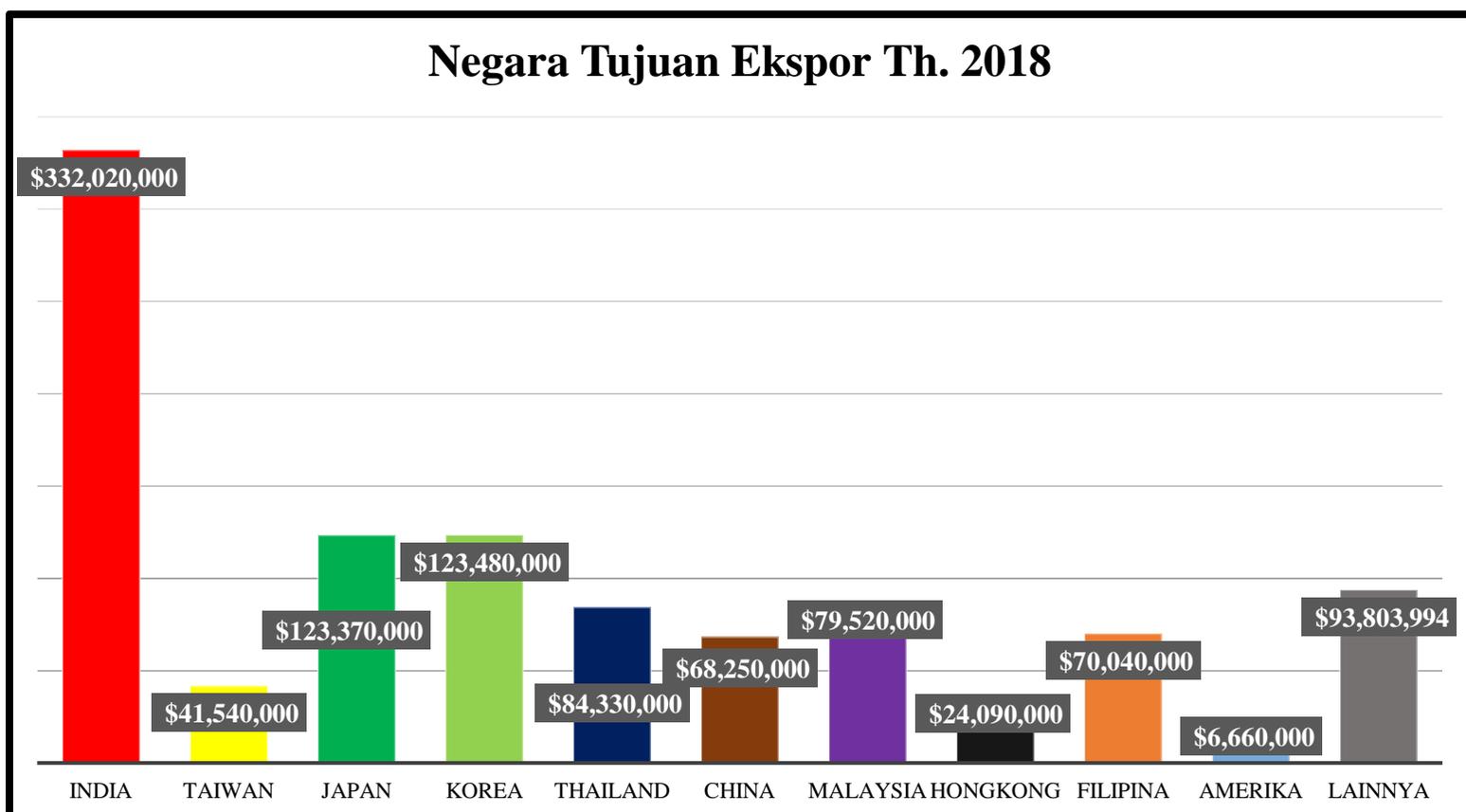


- **Negara Tujuan Ekspor**

Negara	Realisasi Ekspor (US\$)	Persentase
India	\$ 332,020,000	31.71%
Taiwan	\$ 41,540,000	3.97%
Japan	\$ 123,370,000	11.78%
Korea	\$ 123,480,000	11.79%
Thailand	\$ 84,330,000	8.05%
China	\$ 68,250,000	6.52%
Malaysia	\$ 79,520,000	7.59%
Hongkong	\$ 24,090,000	2.30%
Filipina	\$ 70,040,000	6.69%
United States	\$ 6,660,000	0.64%
Negara Lainnya	\$ 93,803,994	8.96%
Total	\$ 1,047,103,994	100%

*Ket : *) Nilai Realisasi ekspor pada tahun 2018 merupakan nilai realisasi ekspor per November 2018*

Berdasarkan data realisasi ekspor Tahun 2018 maka diperoleh negara tujuan ekspor terbesar Kalimantan Utara yaitu India mencapai US\$ 332,020,000 atau sebesar 31.71% dari total keseluruhan ekspor Kalimantan Utara. Komoditas ekspor yang biasanya diekspor ke Negara India yaitu berupa Batu Bara. Negara kedua dan Ketiga tujuan ekspor Prov. Kaltara yaitu Negara Jepang dan Korea dengan total secara berurutan US\$ 123,370,000 atau 11,78% dan US\$ 123,480,000 atau 11,79 dari total ekspor Kaltara.

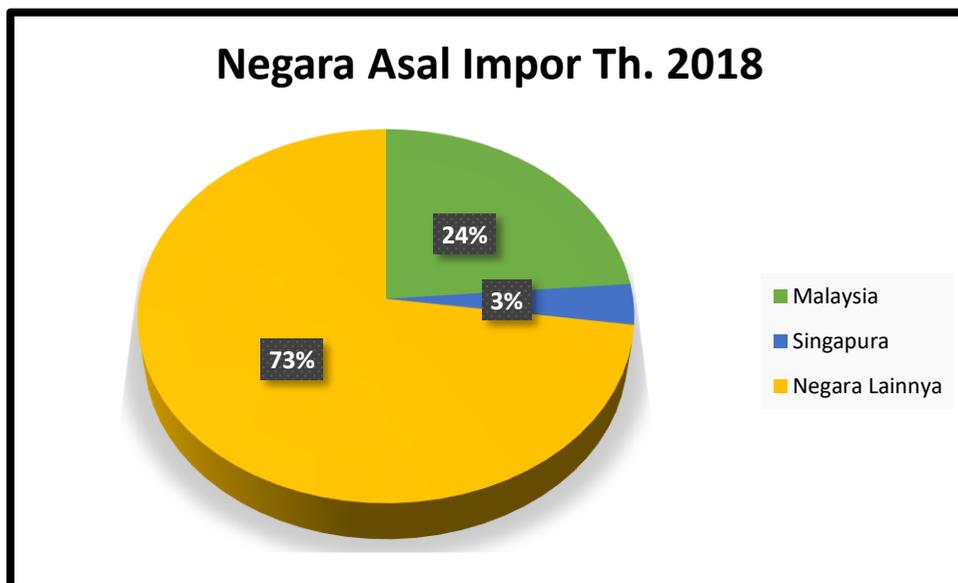


- **Negara Asal Impor**

Secara kumulatif nilai impor Provinsi Kalimantan Utara Januari – November 2018 mencapai US\$ 74,42 juta.

Negara	Realisasi Impor (US\$)	Persentase
Malaysia	\$ 17,650,000	23.72%
Singapura	\$ 2,600,000	3.49%
Negara Lainnya	\$ 54,170,000	72.79%
Total	\$ 74,420,000	100.00%

Impor Provinsi Kalimantan Utara pada November 2018 mengalami kenaikan sebesar 304,64 persen dibanding Oktober 2018, yaitu dari US\$ 0,85 juta menjadi US\$ 3,42 juta. Nilai impor komoditi barang migas tercatat mencapai US\$ 0,63 juta, sedangkan untuk komoditi barang non migas tercatat mencapai US\$ 2,80 juta. Kenaikan nilai impor pada bulan November 2018 disebabkan oleh kenaikan nilai impor komoditi barang hasil minyak, sebesar 1.452,96 persen, yaitu dari US\$ 0,04 juta menjadi US\$ 0,63 juta di November 2018, serta komoditi hasil industri sebesar 351,31 persen, yaitu dari US\$ 0,60 juta menjadi US\$ 2,69 juta di November 2018. Secara kumulatif nilai impor Provinsi Kalimantan Utara periode Januari - November 2018 mencapai US\$ 74,42 juta.



Pada November 2018 ini, transaksi nilai impor berupa barang migas di Provinsi Kalimantan Utara tercatat mencapai US\$ 0,63 juta sedangkan impor non migas tercatat pada November 2018 mencapai US\$ 2,80 Juta yang berasal dari Negara Singapura dan Malaysia masing-masing mencapai US\$ 1,43 Juta dan US\$ 1,36 Juta.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

Provinsi : Kalimantan Utara
 NAMA SKPD : Disperindagkop & UKM
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN:
 1. Urusan Perindustrian
 2. Urusan Perdagangan
 3. Urusan Koperasi dan UKM

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 3 (Tiga) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Perindustrian	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Koperasi & UKM	Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	7(C)	(8A)	(8B)	8(C)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 4 program	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program	60%	80 %	100%	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sebanyak 1 (dua) terdiri dari: 1. SOP Rekomendasi Izin Pada Bidang Perindustrian		-	Ada 1 SOP	Tidak Ada :	TidakAda :	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Perindustrian	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Koperasi & UKM	Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	7(C)	(8A)	(8B)	8(C)	(9)
												ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak -----. - PERDA yang seharusnya, sebanyak	- PERDA pelaksanaan sebanyak -----. - PERDA yang seharusnya, sebanyak -----	- PERDA pelaksanaan sebanyak -----. -PERDA yang seharusnya, sebanyak ----- % % %	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4	- Jabatan yang terisi sebanyak 14 - Jabatan yang ada, sebanyak 14	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 -Jabatan yang ada, sebanyak 4	100%	100%	100%	Sumber data BKD/DUK SKPD
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -- bidang perdagangan -Penguji Mutu Barang pertama (2)	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Tidak ada	ada	tidak ada	Sumber data BKD/SKPD. Mengacu kondisi SKPD terakhir/up dated Tahun 2018.
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 10. personil - Total PNS Provinsi 3.483, sebanyak personil	- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 39. personil - Total PNS Provinsi 3.483, sebanyak	- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 9. personil - Total PNS Provinsi	0,29%	<u>1,12%</u>	<u>0,25%</u>	Sumber data Mengacu kondisi SKPD terakhir/up dated Tahun

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Perindustrian	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Koperasi & UKM	Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	7(C)	(8A)	(8B)	8(C)	(9)
							personil	3.483, sebanyak personil				2018/ BKD.
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi syarat diklat pim, sebanyak 3 org. Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	Pejabat yang memenuhi syarat diklat pim, sebanyak 10 org. Pejabat yang ada, sebanyak 14 org.	Pejabat yang memenuhi syarat diklat pim, sebanyak 4 org. Pejabat yang ada, sebanyak 4 org	75%	71 %	100 %	Sumber data SKPD Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 org. Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt.	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	100 %	100 %	100 %	Sumber Data SKPD Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	-	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD		Ada	Ada	Ada	Sumber data BAPPEDA/ SKPD yang bersangkutan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Perindustrian	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Koperasi & UKM	Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	7(C)	(8A)	(8B)	8(C)	(9)
			10	Jumlah Program RKPД yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPД yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang x 100	- Jumlah Program RKPД yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program. - Jumlah Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 Program	- Jumlah Program RKPД yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program. - Jumlah Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5	- Jumlah Program RKPД yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program. Jumlah Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3	60%	100%	100%	Sumber data SKPD Mengacu dokumen RKPД tahun 2018 dan Renja-SKPD ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Jumlah Program RENJA RKPД yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. - Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.	- Jumlah Program RENJA RKPД yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program. - Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.	- Jumlah Program RENJA RKPД yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. - Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.	100%	100 %	100 %	Sumber data SKPD. Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2018 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. - Jumlah Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.	- Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. - Jumlah Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.	- Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. - Jumlah Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2	100%	100 %	100 %	Sumber data dari dokumen RKA-SKPD tahun 2018 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2018.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Perindustrian	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Koperasi & UKM	Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	7(C)	(8A)	(8B)	8(C)	(9)
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 2.999.566.840 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 3.154.988.259.583,19	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 27.400.380.816 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 3.154.988.259.583,19	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 2.967.922.000 -Total Belanja APBD, sebesar Rp 3.154.988.259.583,19	0,95 %	0,86 %	0,94 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. -	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 15.504.200.900 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 33.367.869.656,	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. - - Total Belanja SKPD,0 sebesar Rp. 0	0%	46%	0%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 6.662.893.026	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 111.755.320 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 6.662.893.026	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 6.662.893.026	0%	0,17%	0%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 17.392.059.095	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 111.755.320 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 33.367.869.656,5	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 0	-	-	0,33%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Perindustrian	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Koperasi & UKM	Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	7(C)	(8A)	(8B)	8(C)	(9)
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca,LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 1 jenis, sbb:	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 1 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3.Calk	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 1 jenis, sbb:	ada	Ada	ada	Sumber data dari Laporan Keuangan SKPD. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - Kartu Inventaris Barang	ada	ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset SKPD (SORTIR UNTUK ASET BIDANG)	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, Rp 0 - Asset yang dikuasai SKPD, Rp 0	- Asset yang tidak digunakan,Rp 0 - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. 19.844.821.600	- Asset yang tidak digunakan,Rp 0 - Asset yang dikuasai SKPD, Rp.	0 %	100 %	0 %	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Perindustrian	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Koperasi & UKM	Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	7(C)	(8A)	(8B)	8(C)	(9)
												dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan Pengumuman 2. Leaflet	1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Website	1. Papan Pengumuman	Jumlah sebanyak – 2 Jenis	Jumlah sebanyak – 3 Jenis	Jumlah Sebanyak 1 Jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Kepatuhan Pelayanan Publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Kepatuhan Pelayanan Publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Kepatuhan Pelayanan Publik	ada	ada	ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018.

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
1	Pendidikan	1	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI	$\frac{\text{Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI}}{\text{Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas Pendidikan/Dinas Sosial
		2	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS	$\frac{\text{Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS}}{\text{Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas Pendidikan/Dinas Sosial
		3	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas Pendidikan/Dinas Sosial
		4	Pembinaan Guru jenjang SD/MI	$\frac{\text{Jumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi}}{\text{Jumlah Guru jenjang SD/MI}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		5	Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS	$\frac{\text{Jumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi}}{\text{Jumlah Guru jenjang SMP/MTS}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		6	Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi}}{\text{Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		7	Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan		Peta penjaminan mutu pendidikan	Ada/tidak*)

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
2	Kesehatan	8	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		9	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		10	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		11	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		14	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		15	Cakupan kunjungan bayi	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
3	Lingkungan Hidup	16	Pencemaran Udara	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten dan kota yg dipantau mutu udara ambient Dikawasan pemukiman atau industri}}{\text{Jumlah seluruh kabupaten dan kota}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas LH
		17	Kebersihan	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari Dinas LH Tergolong baik sesuai dengan criteria Adipura
		18	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		19	Penegakan hukum lingkungan	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
4	Pekerjaan Umum	20	Jalan provinsi dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan provinsi}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas PU
		21	Rumah tangga Persanitasi	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		22	Kawasan kumuh	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
5	Tata Ruang	23	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
6	Perencanaan Pembangunan	24	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD	Ada/tidak	Ada/tidak*)	Sumber data dari BAPPEDA/SKPD
		25	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD	Ada/tidak	Ada/tidak*)	Sumber data dari BAPPEDA/SKPD
		26	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD	Ada/tidak	Ada/tidak*)	Sumber data dari BAPPEDA/SKPD
		27	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah program RKPD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100 \%$%	Sumber data dari BAPPEDA/SKPD
7	Perumahan	28	Rumah tangga pengguna air bersih	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		29	Rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
8	Kepemudaan & Olahraga	30	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		31	Lapangan olahraga	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
9	Penanaman Modal	32	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	$\frac{\text{Realisasi PMDN thn 2015} - \text{Realisasi PMDN 2014}}{\text{Realisasi PMDN 2014}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas Penanaman Modal

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
10	Koperasi & UKM	33	Koperasi aktif	Jumlah Koperasi Aktif 552 Jumlah Seluruh Koperasi 769	67,88 %	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		34	Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah Usaha Mikro Aktif 976 Jumlah seluruh usaha mikro 976	100 %	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
11	Kependudukan & Catatan Sipil	35	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/tidak ada	. Ada/ tidak ada	Sumber data dari Dukcaoil
12	Ketenagakerjaan	36	Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/buruh	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota Jumlah pekerja/buruh
		37	Pencari kerja yang sudah ditempatkan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
13	Ketahanan Pangan	38	Regulasi ketahanan pangan	Ada/Tidak	. Ada/ tidak ada	Sumber data dari Dinas Ketahanan Pangan
		39	Ketersediaan pangan utama	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah ----- x 100 % Jumlah pekerja perempuan%	Sumber data dari Dinas Tenaga Kerja/PPA
		41	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
15	KB & KS	42	Tingkat prevalensi peserta KB aktif	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		43	Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
16	Perhubungan	44	Angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
17	Komunikasi & Informatika	45	Web site milik pemerintah daerah	Ada/Tidak		Sumber data dari Dinas Kominfo
		46	Pameran/expo	Menunjukkan jumlah pameran/expo yang dilaksanakan per tahun	Sumber data dari Dinas Kominfo
18	Pertanahan	47	Luas lahan bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
19	Kesbang & Politik	48	Kegiatan pembinaan politik daerah	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah	Sumber data dari Kesbangpol
		49	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Sumber data dari Kesbangpol
20	Otonomi Daerah	50	Sistim Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	Menunjukkan Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	Sumber data dari Dinas Kominfo/Biro Pemerintahan
		51	Tapal batas	$\frac{\text{Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang diselesaikan}}{\text{Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang dilaporkan}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Biro Pemerintahan
21	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	52	PKK aktif	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
22	Sosial	53	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah	Sumber data dari Dinas Sosial

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		54	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yg diberikan bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas Sosial
23	Budaya	55	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Sumber data dari Dinas Budpar
		56	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Sumber data dari Dinas Budpar
24	Statistik	57	Buku "propinsi dalam angka"	Ada/Tidak	Ada/tidak*)	Sumber data dari BAPPEDA
		58	Buku "PDRB provinsi"	Ada/Tidak	Ada/tidak*)	Sumber data dari BAPPEDA
25	Kearsipan	59	Pengelolaan arsip secara baku	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Badan/Dinas Kearsipan
		60	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Sumber data dari Badan/Dinas Kearsipan
26	Perpustakaan	61	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	$\frac{\text{Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah}}{\text{Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah}}$	Sumber data dari Badan/Dinas Perpustakaan
		62	Pengunjung perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun}}{\text{Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani}}$	Normalisasi
URUSAN PILIHAN						
1	Kelautan & perikanan	1	Produksi perikanan	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota penghasil perikanan}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota penghasil perikanan}}$%	Sumber data dari Dinas Kelautan dan Perikanan
		2	Ekspor hasil perikanan	$\frac{\text{Nilai export hasil perikanan (ton pertahun)}}{\text{Target daerah}}$%	Sumber data dari Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		3	Konsumsi ikan	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
2	Pertanian	4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		5	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2015	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$%	Sumber data dari buku PDRB sector pertanian (harga berlaku)
3	Kehutanan	6	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	$\frac{\text{Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi}}{\text{Luas total hutan dan lahan kritis}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas Kehutanan
		7	Kerusakan Kawasan Hutan	$\frac{\text{Luas Kerusakan Kawasan Hutan}}{\text{Luas Kawasan Hutan}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas Kehutanan
4	Energi dan SDM	8	Pertambangan tanpa ijin	$\frac{\text{Luas Penambangan Liar yang ditertibkan}}{\text{Luas area penambangan yang liar}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas Pertambangan/E SDM
		9	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2015	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$%	Sumber data dari buku PDRB sector pertambangan (harga berlaku)
5	Pariwisata	10	Kunjungan wisata	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		11	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2015	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$%	Sumber data dari buku PDRB sektor jasa, hotel, restoran (harga berlaku)

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
6	Industri	12	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2018	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri}}{\text{Jumlah total PDRB}}$	9,98 %	Sumber data dari buku PDRB sektor industri (harga berlaku)
		13	Pertumbuhan Industri secara keseluruhan	$\frac{\text{Jumlah Industri tahun 2018 (2937)} - \text{Jumlah Industri tahun 2016 (2568)}}{\text{Jumlah Industris/d tahun 2018 (2937)}} \times 100\%$	12,56 %	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
7	Perdagangan	14	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah total PDRB}}$	11,36 %	Sumber data dari buku PDRB sektor perdagangan (harga berlaku)
		15	Ekspor Bersih Perdagangan	$\frac{\text{nilai ekspor bersih} = \text{nilai ekspor} - \text{nilai impor}}{\text{US\$ 1,047.103.994} - 74.420.000}$	US\$. 972.683.994	Sumber data dari Dinas Perdagangan
8	Transmigrasi	16	Transmigran swakarsa	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Normalisasi